

TERJEMAHAN

Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions

Rohana Othman^{a*}, Nooraslinda Abdul Aris^b, Ainun Mardziah^a, Norhasliza Zainan^b and Noralina Md Amin^b

^a*Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Malaysia.*

^b*Faculty of Accountancy, Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Malaysia.*

dipublikasikan dalam
Procedia Economics and Finance 28 (2015) 59 – 67
ISSN (Electronic) : 2212-5671

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCIAL CRIMINOLOGY 2015
13-14 April 2015, Wadham College, Oxford, United Kingdom

dapat diunduh di:

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115010825>

Diterjemahkan oleh:

Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E.
NIP. 19791126 200212 2 003

Auditor Pertama Inspektorat I
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,

Jakarta, 30 Januari 2017

Metode Deteksi dan Pencegahan *Fraud* (Tindakan Kecurangan) Pada Sektor Publik di Malaysia: Persepsi Akuntan dan Auditor Internal

Rohana Othman^{a*}, Nooraslinda Abdul Aris^b, Ainun Mardziyah^a, Norhasliza Zainan^b and Noralina Md Amin^b

^a*Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Malaysia.*

^b*Fakultas Akuntansi, Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Malaysia.*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode dalam rangka mendeteksi dan mencegah kecurangan dan korupsi pada sektor publik di Malaysia dan terkait persepsi efektifitas dari sudut pandang para akuntan. Studi ini menggunakan kuesioner terstruktur (Cates,1985) pada sampel populasi yang terdiri dari akuntan dan auditor internal dari sektor publik di Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa audit operasional, meningkatkan fungsi dari komite audit, memperbaiki pengendalian internal, implementasi kebijakan atas pelaporan tindakan kecurangan, rotasi pegawai, menyediakan saluran telepon khusus (*hotlines*) terkait tindakan kecurangan dan adanya akuntan forensik, adalah beberapa mekanisme yang paling efektif untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan yang terjadi di sektor publik. Studi ini berkontribusi dalam memperluas ruang lingkup dan efektifitas deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan dan korupsi dalam roda pemerintahan di Malaysia

Kata kunci: Metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan, sektor publik, akuntan forensik

1. Pendahuluan

Sangatlah penting bagi sebuah organisasi untuk membangun suatu metode yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan karena hal ini dapat mengurangi kesempatan munculnya tindakan kecurangan (Bierstaker, Brody dan Pacini, 2006). Metode ini dapat meliputi komunikasi tingkat manajerial untuk intoleran terhadap aktifitas penipuan, melaksanakan skema remunerasi dan transparansi, seleksi sebelum perekrutan dan berkelanjutan, serta yang paling signifikan adalah mendorong budaya sadar akan tindakan kecurangan (PwC, 2012). Sebuah survey dilakukan oleh PwC (2014) mengungkapkan bahwa 37% responden di seluruh dunia melaporkan terdapat tindakan kecurangan di organisasi mereka, dan tingkat kejahatan ekonomi kelihatannya bertahan sebagai ancaman terhadap bisnis yang sedang dijalankan dan proses bisnis itu sendiri. Ernst & Young (2014) melaporkan bahwa 59 negara yang terlibat dalam survey setuju bahwa tingkat kejadian kecurangan dan kasus yang dilaporkan tidak mengalami penurunan. Bahkan tindakan kecurangan dengan cara baru selalu muncul dan permasalahan yang dianggap tidak layak atau curang oleh regulator dan publik terus berkembang.

Sebuah survey oleh KPMG Malaysia (2013) menemukan bahwa tingkat tertinggi dari pelaku tindakan kecurangan adalah sekitar 50% dari pegawai yang mewakili. Pegawai ini berasal dari non manajemen. Pada tahun 2009, kategori pelaku tindakan kecurangan ini, secara kontras, hanya mewakili sekitar 34%. Angka ini memperingatkan pemerintah dan manajemen, bahwa terdapat peningkatan 16% di tahun 2013. Kategori kedua pelaku tindakan kecurangan adalah pelanggan, selanjutnya adalah manajemen, masing-masing mewakili sekitar 18% dari tiap kategori. Pelaku tindakan kecurangan lainnya diidentifikasi sebagai penyedia jasa (8%) dan pemasok (6%). Laporan tersebut juga menggarisbawahi bahwa pencurian dari dana yang keluar menempati kategori tertinggi dari tindakan kecurangan yaitu 67% di tahun 2013, dibandingkan dengan survey di tahun 2009 yaitu 57%. Peringkat kedua, adalah pencurian dari aset fisik sebesar 58%, selanjutnya pencurian dana yang masuk sebesar 34%. Pada basis individual, tipe tindakan kecurangan yang paling umum adalah pencurian pada kas dan kas bon (26%), selanjutnya adalah kuitansi palsu (16%), dan pencurian persediaan (13%) (KPMG Malaysia, 2013). Pemerintah dan pihak swasta sebagaimana diklaim oleh Ernst & Young (2014) sepakat bahwa tindakan kecurangan, suap dan korupsi berdampak buruk bagi masyarakat dan perekonomian, dan pastinya diperlukan langkah yang harus diambil untuk mengurangi hal tersebut.

Pencegahan tindakan kecurangan merupakan cara pertama untuk menghentikan munculnya tindakan kecurangan. Deteksi tindakan kecurangan biasanya muncul setelah pencegahan tindakan kecurangan gagal, padahal seyogyanya dapat mengidentifikasi tindakan kecurangan sesegera mungkin setelah kejahatan itu timbul (Bolton dan Hand, 2002). Pada dasarnya, deteksi tindakan kecurangan harus digunakan dan dilakukan secara berkelanjutan, karena tindakan kecurangan terus berevolusi. Jelaslah, pendekatan tradisional untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan, seperti melakukan audit, tidak cukup efektif dan hanya memungkinkan mendeteksi tindakan kecurangan berbulan-bulan setelah transaksi dilakukan. Dalam beberapa kasus akibat dari kehilangan besar tersebut menyebabkan organisasi kehilangan keseimbangannya dan bisnis akan jatuh. Penemuan tindakan kecurangan yang terlambat akan hanya meminta hukuman ganti rugi, hal ini menunjukkan pendekatan reaktif daripada proaktif. Oleh karena itu memahami penyebab tindakan kecurangan atau kejahatan ekonomi menjadi hal yang sangat penting, karena akan mengarah pada identifikasi mekanisme yang paling efektif untuk mendeteksi dan mencegah timbulnya tindakan kecurangan.

Studi sebelumnya mengenai metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan berfokus terutama pada sektor swasta. (Bierstaker, Brody dan Pacini, 2006; Smith, 2012; Apostolou dan Crumbley, 2008; Alleyne dan Horward, 2005; Oluwagbemiga, 2010; Durtschi; Rahman dan Anwar, 2014). Terdapat sedikit studi yang dilakukan mengenai deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan di sektor publik. Terdapat berbagai prosedur audit yang dapat digunakan untuk mendeteksi tindakan kecurangan di sektor publik. Menariknya, sebagian besar peneliti menemukan bahwa prosedur analitis adalah metode yang paling efektif untuk mendeteksi tindakan kecurangan. Oleh karena itu, tujuan dari studi ini adalah: (i) Untuk mengidentifikasi kesadaran pegawai akan adanya tindakan kecurangan, (ii) Untuk menelaah keberadaan teknik deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan dalam organisasi di sektor publik; dan (iii) untuk menelaah pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Temuan dari studi ini memberikan pemahaman terhadap kesadaran deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan di antara organisasi sektor publik di Malaysia.

Studi ini disusun dalam lima bagian. Bagian kedua berisi diskusi masih adanya studi tentang metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Bagian berikutnya adalah, penjabaran mengenai temuan dari studi ini dan akhirnya merupakan kesimpulan.

2. Tinjauan Literatur

Sebuah survey tentang kesadaran, pencegahan dan deteksi adanya tindakan kecurangan di sektor publik oleh PWC (2012) bagi General-Auditor New Zealand menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah instrumen yang paling efektif untuk mendeteksi tindakan kecurangan, dengan 36% responden mensinyalir bahwa tindakan kecurangan terdeteksi dengan metode ini. Survey ini juga menemukan bahwa kurang dari 1% peristiwa tindakan kecurangan ditemukan oleh auditor eksternal, karena mendeteksi tindakan kecurangan ditentukan atau ditekankan oleh eksternal audit. Akan tetapi Apostolou and Crumbley (2008) mengamati bahwa baik pembuat kebijakan maupun pemangku kepentingan memperkuat peran auditor, rintangan yang ada dan deteksi tindakan kecurangan. Mereka menyatakan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) – Badan Pengawasan Perusahaan Akuntansi--, AU pasal 316.52 membahas berbagai sifat, waktu dan ruang lingkup syarat prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk mengenali resiko salah saji material dalam laporan keuangan terkait tindakan kecurangan.

Sebuah panduan praktis disusun oleh Kantor Audit Nasional Australia dan KPMG (2012) mengidentifikasi bahwa pendekatan pencegahan tindakan kecurangan adalah baris pertahanan utama dan menyediakan metode yang paling efektif untuk mengendalikan tindakan kecurangan dalam suatu entitas. Termasuk budaya etis organisasional, kesadaran yang tinggi akan adanya tindakan kecurangan di antara pegawai, penjual dan pelanggan, dan kerangka pengendalian internal yang efisien yang memungkinkan review yang konsisten dari penjual, penggalan data, analisis dan mekanisme pelaporan eksternal dan internal seperti saluran pengaduan khusus (*hotline*), penggunaan *website*, dan saluran pelaporan internal.

Haron, Mohamed, Jomitin dan Omar (2014) menemukan bahwa adanya akuntan forensik adalah penting untuk suatu organisasi yang bertujuan mengurangi jumlah timbulnya tindakan kecurangan di sektor publik. Akuntan forensik memiliki keuntungan dapat menginvestigasi di luar bentuk auditor tradisional atau metode akuntan. Studi ini dilakukan berdasarkan wawancara dan kuesioner yang disebarkan kepada pegawai administrasi dari empat wakil sektor publik di Malaysia; Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian, Otoritas Lokal dan Badan Legislasi. Eiya dan Otor (2013) menyarankan bahwa akuntansi forensik adalah alat untuk melawan kejahatan keuangan, auditor forensik sebagai seorang saksi ahli seharusnya setiap waktu menggunakan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya untuk mendukung pendapat ahli yang dikemukakannya terhadap suatu bukti atau isu. Menurut Bierstaker dkk. (2006), meskipun penggunaan akuntan forensik dalam organisasi minim untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan, tetap saja cara ini memiliki rata-rata peringkat efektivitas tertinggi.

Albrecht dan Zimbelman dkk. (2012) menemukan bahwa kemajuan teknologi telah menurunkan teknik deteksi tindakan kecurangan yang proaktif yang menganalisa data dan transaksi untuk memisahkan gejala tindakan kecurangan seperti tren, angka dan anomali lainnya. Sementara Bierstaker, dkk. (2006) menyimpulkan bahwa sistem keamanan jaringan, perlindungan *password* dan virus komputer digunakan secara teratur untuk

melawan fraud. Namun, meskipun menerima peringkat efektifitas tertinggi, menemukan sampling, audit berkelanjutan, analisa perangkat lunak (*software*) digital dan penggalian data, kurang digunakan oleh akuntan dalam teknik anti-fraud.

Sebuah studi dilakukan oleh Rahman dan Anwar (2014) pada sebuah bank Islam di Malaysia, menemukan metode efektif dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan dengan menggunakan perlindungan *software* seperti sistem keamanan jaringan dan menyaring *software* yang diinstal di sistem komputer dengan perlindungan *password*. Jans, Lybaert dan Vanhoof (2010), memfokuskan studi mereka pada pengurangan resiko tindakan kecurangan internal baik deteksi maupun pencegahan, diperoleh dengan menggunakan kasus pengadaan yang dilaksanakan di perusahaan, data dalam teknik penggalian data secara deskriptif, memudahkan penilaian resiko yang ada pada tindakan kecurangan internal.

Bentuk lain dari metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan melibatkan “tanda atau peringatan bahaya”. Pincus (1989) mempelajari efektifitas kuesioner “tanda bahaya” untuk mengevaluasi kemungkinan dari adanya tindakan kecurangan. Hasil menunjukkan bahwa auditor yang menggunakan kuesioner “tanda bahaya” dalam penilaian risiko tindakan kecurangan, mengukur indikator potensi tindakan kecurangan yang lebih komprehensif dibandingkan auditor yang tidak menggunakannya. Lebih lanjut Gullkvist dan Jokipii (2013) meneliti “tanda bahaya” berdasarkan bentuk tindakan kecurangan; penggelapan aset dan pemalsuan laporan keuangan, dan mereka menyimpulkan bahwa “tanda bahaya” adalah penting dalam laporan auditor internal terkait dengan deteksi penggelapan aset. Sebuah studi oleh Seetharam, Senthilvelmurugan, dan Periyanyagam (2004) menekankan pada kuatnya pengendalian internal sebagai cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Moyes dan Baker (2003) melaksanakan sebuah survey dari auditor yang menjalankan pentingnya efektifitas deteksi tindakan kecurangan, dan hasilnya menunjukkan bahwa 218 dari 56 prosedur dianggap lebih efektif dalam mendeteksi tindakan kecurangan. Secara umum prosedur yang paling efektif terkait dengan keberadaan dan/atau kekuatan dari pengendalian internal dalam organisasi.

Omar dan Bakar (2012) melaksanakan sebuah survey tentang Mekanisme Pencegahan Tindakan kecurangan pada *Holding company* milik Pemerintahan Malaysia: Suatu Penilaian terhadap Keberadaan dan Efektifitas, dan hasilnya menunjukkan bahwa reviu manajemen pada pengendalian internal dan audit eksternal dalam laporan keuangan menduduki peringkat tertinggi dari mekanisme pencegahan tindakan kecurangan berdasarkan persentase keberadaannya dalam organisasi yang diterima oleh auditor internal dan investigator tindakan kecurangan, kemudian audit operasional, audit internal atau Departemen pemeriksaan tindakan kecurangan, dan reviu pengendalian internal dan perbaikan oleh setiap bagian. Omar dan Bakar (2012) menyatakan bahwa perusahaan mengabaikan keberadaan “tanda peringatan bahaya” dan tindakan hanya dilaksanakan setelah menemukan tindakan kecurangan. Mereka mengidentifikasi mekanisme pencegahan tindakan kecurangan yang sering dilakukan di Perusahaan tersebut adalah reviu manajemen atas pengendalian internal dan audit eksternal pada laporan keuangan, sementara mekanisme pencegahan yang efektif adalah saluran pengaduan, audit sewaktu, kebijakan anti tindakan kecurangan, pelatihan dan program pencegahan tindakan kecurangan, audit operasional, reviu kerentanan tindakan kecurangan, audit internal atau Departemen pemeriksaan tindakan kecurangan, kebijakan *whistle-blowing*, dan penganan sanksi serta tindakan disiplin.

3. Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menelaah beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas. Dalam studi ini, sampel terdiri dari para akuntan dan auditor internal dari organisasi sektor publik di Malaysia. Sampel dipilih secara acak dari sembilan organisasi sektor publik dan enam institusi pendidikan tinggi.

Sebuah teknik kuesioner survey yang terstruktur (Cates, 1985) digunakan, terdiri dari 43 pernyataan yang dibagi menjadi empat bagian. Bagian A adalah profil demografi responden. Pada bagian B, responden ditanyakan tentang tingkat kewaspadaan mereka tentang tindakan kecurangan yang terjadi dalam organisasinya. Sementara, bagian C merujuk pada pemahaman responden terhadap teknik deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan di organisasinya. Bagian D berisi pertanyaan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Menggunakan lima poin skala Likert berkisar dari "1" (Sangat Tidak Setuju) hingga "5" (Sangat Setuju). Total 53 kuesioner dikembalikan dari 150 kuesioner yang dibagikan. Hanya 51 respon dapat digunakan yang mewakili 34% nilai respon, dengan 2 respon yang tidak lengkap. Data survey dianalisa menggunakan analisis deskriptif. Skala Cronbach Alpha untuk bagian B, C dan D masing-masing adalah .529, .940 dan .873, mengindikasikan tingkat kepuasan yang tinggi dan moderat terhadap konsistensi internal.

4. Analisis Data dan Temuan

Tabel 1 menunjukkan profil demografi responden. Dari seluruh total responden, terdapat 21 Laki-laki (41%) dan 30 Perempuan (59%). Untuk Usia, rata-rata tertinggi adalah antara 31-40 tahun (70%), dan dibawah 30 tahun (16%). Sebagian besar responden bergelar sarjana (86%), dan bergelar Master (10%). Tercatat bahwa 41% responden memiliki pengalaman kerja antara 6-10 tahun. Masing-masing pekerja dengan pangkat 41-44 (49%) dan 48-52 (47%) mewakili sebagian besar responden dan hanya 4% responden di tingkat manajemen dan profesional.

Keterangan		N=51	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	21	41
	Perempuan	30	59
Usia	< 30 tahun	8	16
	31-40 tahun	36	70
	41-60 tahun	7	14
Pendidikan	Diploma	1	2
	Sarjana	44	86
	Profesi	1	2
	Master	5	10
Lama Kerja	< 5 tahun	15	29
	6-10 tahun	21	41
	11-15 tahun	12	24
Pangkat	> 16 tahun	3	6
	41-44	25	49
	48-52	24	47
	> 54	2	4

4.1 Kesadaran Akan Tindakan kecurangan

Tabel 2 membeberkan frekuensi, rata-rata dan standar deviasi untuk hasil setiap pernyataan. Bagian B dari survey terdiri dari 10 pernyataan yang diarahkan untuk mengidentifikasi kesadaran pegawai di sektor publik terhadap tindakan kecurangan yang terjadi di organisasi mereka. Nilai rata-rata berkisar dari 3.18 hingga 4.41, yang artinya bahwa sebagian besar responden berada diantara “kurang setuju” dan “setuju”. Delapan pernyataan memiliki nilai rata-rata (M) di skala “kurang setuju”, dimana 2 pernyataan (3 dan 4) bermilai skala “setuju”. Pernyataan 3 (M=4.41) dan 4 (M=4.39) menunjukkan bahwa responden sangat sadar untuk melapor dan bertanggung jawab untuk mendeteksi tindakan kecurangan.

Untuk mengidentifikasi kesadaran pegawai di sektor publik terhadap tindakan kecurangan, responden ditanyakan apakah mereka sadar akan adanya tindakan kecurangan di bagian mereka. 75% setuju bahwa organisasi mereka telah menjadi korban tindakan kecurangan dan diduga angka ini akan meningkat. 74.5% setuju terdapat tekanan pada pegawai negeri dalam menghadapi tuntutan tertentu di luar batas kewenangan mereka. Temuan ini, dapat mengindikasikan bahwa pegawai negeri kadang harus membuat keputusan diluar kewenangannya mengikuti perintah atasannya, dan menyadari bahwa tindakan ini salah atau melanggar prosedur yang wajar.

	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Rata rata	Stdr Deviasi
QF1	Saya mengharapkan tindakan kecurangan meningkat di organisasi di masa yang akan datang	1 (2.0)	2 (3.9)	7 (13.7)	30 (58.8)	11 (21.6)	3.94	.835
QF2	Organisasi saya menjadi korban tindakan kecurangan	5 (9.8)	6 (11.8)	4 (7.8)	24 (47.1)	12 (23.5)	3.63	1.248
QF3	Jika terjadi tindakan kecurangan saya akan melapor ke pihak berwenang			1 (2.0)	28 (54.9)	22 (43.1)	4.41	.536
QF4	Semua pegawai termasuk manajemen atas bertanggungjawab untuk mendeteksi tindakan kecurangan		2 (3.9)	4 (7.8)	17 (33.3)	28 (54.9)	4.39	.802
QF5	Auditor internal memiliki peran penting dalam mendeteksi tindakan kecurangan	1 (2.0)	4 (7.8)	7 (13.7)	30 (58.8)	9 (17.6)	3.82	.8888
QF6	Tindakan kecurangan biasanya terdeteksi melalui proses audit		1 (2.0)	11 (21.6)	28 (54.9)	11 (21.6)	3.96	.720
QF7	Pegawai sector publik selalu berada dibawah tekanan untuk memenuhi tuntutan tertentu diluar kewenangannya		4 (7.8)	9 (17.6)	25 (49.0)	13 (25.5)	3.92	.868
QF8	Dalam tiga tahun terakhir, teknik deteksi kecurangan di organisasi saya telah diperbaiki		3 (5.9)	11 (21.6)	28 (54.9)	9 (17.6)	3.84	.784

QF9	Dalam tiga tahun terakhir, saya telah menghadiri pelatihan untuk memperbaiki keterampilan saya dalam pencegahan tindakan kecurangan	3 (5.9)	7 (13.7)	17 (33.3)	22 (43.1)	2 (3.9)	3.25	.956
QF10	Pertemuan komite audit diselenggarakan setiap dua tahun sekali	5 (9.8)	10 (19.6)	9 (17.6)	25 (49.0)	2 (3.9)	3.18	1.108

Terkait dengan kursus dan pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi pegawai negeri dalam metode deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan, 47% setuju mereka menghadiri pelatihan sejenis secara teratur. Walaupun, tercatat bahwa 53% dari responden tidak menghadiri pelatihan yang cukup tentang deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Hal ini mungkin menandakan beberapa Bagian tidak menyediakan kursus atau pelatihan tentang deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Hal ini penting, karena pelatihan sejenis akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akuntan dan auditor internal dalam menangani masalah tindakan kecurangan di bagiannya. Walaupun, menyayangkan kekurangan pelatihan yang disediakan di bagian mereka, 73% setuju bahwa dalam tiga tahun, terdapat perbaikan dalam metode deteksi tindakan kecurangan yang dilaksanakan di organisasi mereka.

4.2 Keberadaan Metode Deteksi dan Pencegahan Tindakan Kecurangan di Sektor Publik

Untuk membahas tujuan kedua dari studi ini, akuntan dan auditor internal di sektor publik diberi pertanyaan untuk mengindikasikan apakah mereka melaksanakan prosedur dalam deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Nilai rata-rata (M) berkisar antara 3.25 hingga 4.14 menunjukkan “kurang setuju” dan “setuju”. Total 24 pernyataan dimasukkan dalam Bagian C dimana prosedur tindakan kecurangan dan penggunaan perangkat lunak diberi peringkat dari “sering digunakan” hingga “jarang digunakan”. Hasil di Tabel 3 menunjukkan bahwa audit operasional (M=4.14), meningkatkan peran komite audit (M=4.10), perbaikan dan reviu pengendalian internal (M=4.08), reviu kas (M=4.06), kebijakan pelaporan tindakan kecurangan (M=4.02), dan kebijakan rotasi staf (M=4.02) adalah diantara mekanisme yang sering digunakan di sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan dan auditor internal memainkan peran penting dalam deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan.

Tabel 3. Prosedur Deteksi Tindakan Kecurangan								
	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Rata-rata (M)	Standar Deviasi
QFDC1	Kebijakan kode perilaku/etik perusahaan		4 (7.8)	8 (15.7)	31 (60.8)	8 (15.7)	3.84	.784
QFDC2	Review dan perbaikan pengendalian internal		2 (3.9)	6 (11.8)	29 (56.9)	14 (27.5)	4.08	.744
QFDC3	Memeriksa riwayat dan kualifikasi pegawai		2 (3.9)	11 (21.6)	27 (52.9)	11 (21.6)	3.92	.771
QFDC4	Kontrak kerja pegawai		3 (5.9)	12 (23.5)	22 (43.1)	14 (27.5)	3.92	.868
QFDC5	Audit tindakan kecurangan		2 (3.9)	10 (19.6)	29 (56.9)	10 (19.6)	3.92	.744
QFDC6	Kebijakan pelaporan tindakan kecurangan		1 (2.0)	9 (17.6)	29 (56.9)	12 (23.5)	4.02	.707
QFDC7	Saluran telepon untuk pelaporan tindakan kecurangan	1 (2.0)	2 (3.9)	18 (35.3)	26 (51.0)	4 (7.8)	3.59	.779
QFDC8	Kebijakan <i>Whistleblowing</i>	2 (3.9)	3 (5.9)	15 (29.4)	24 (47.1)	7 (13.7)	3.61	.940
QFDC9	Audit operasional	1 (2.0)		5 (9.8)	30 (58.8)	15 (29.4)	4.14	.749
QFDC10	Organisasi menggunakan akuntan forensik	2 (3.9)	8 (15.7)	18 (35.3)	18 (35.3)	5 (9.8)	3.31	.990
QFDC11	Pelatihan tentang deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan	2 (3.9)	4 (7.8)	6 (11.8)	30 (58.8)	9 (17.6)	3.78	.966
QFDC12	Ethics training		4 (7.8)	5 (9.8)	29 (56.9)	13 (25.5)	4.00	.825
QFDC13	perlengkapan pengawasan	1 (2.0)	5 (9.8)	18 (35.3)	22 (43.1)	5 (9.8)	3.49	.880
QFDC14	Meningkatkan perhatian manajemen senior	2 (3.9)	1 (2.0)	6 (11.8)	28 (54.9)	14 (27.5)	4.00	.917

QFDC15	Aturan perijinan terhadap supplier/kontraktor		2 (3.9)	6 (11.8)	33 (64.7)	10 (19.6)	4.00	.693
QFDC16	Meningkatkan peran komite audit		1 (2.0)	7 (13.7)	29 (56.9)	14 (27.5)	4.10	.700
QFDC17	Pengawasan korespondensi secara elektronik	5 (9.8)	8 (15.7)	13 (25.5)	19 (37.3)	6 (11.8)	3.25	1.163
QFDC18	Kebijakan rotasi pegawai	2 (3.9)	2 (3.9)	5 (9.8)	26 (51.0)	16 (31.4)	4.02	.969
QFDC19	Departemen keamanan		7 (13.7)	11 (21.6)	24 (47.1)	9 (17.6)	3.69	.927
QFDC20	Program konsultasi pegawai	1 (2.0)	6 (11.8)	11 (21.6)	26 (51.0)	7 (13.7)	3.63	.937
QFDC21	Review kas	1 (2.0)	2 (3.9)	5 (9.8)	28 (54.9)	15 (29.4)	4.06	.858
QFDC22	Pemantauan persediaan	1 (2.0)	1 (2.0)	7 (13.7)	34 (66.7)	8 (15.7)	3.92	.744
QFDC23	Rekonsiliasi bank		2 (3.9)	7 (13.7)	33 (64.7)	9 (17.6)	3.96	.692
QFDC24	Petugas penegak etika		3 (5.9)	7 (13.7)	32 (62.7)	9 (17.6)	3.92	.744

Hal ini didukung oleh temuan Alleyne dan Howard's (2005) bahwa auditor internal, suara pengendalian internal dan komite audit yang efektif, memungkinkan deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Auditor internal yang memahami berbagai jenis tindakan kecurangan dan tingkat keterjadiannya akan lebih dapat mengenali "tanda bahaya" dan lebih siap memerangi biaya yang tinggi dalam organisasi yang disebabkan oleh tindakan kecurangan. Sementara While Perry dan Bryan (1997) menyatakan bahwa auditor internal sebaiknya dipersiapkan untuk mengajarkan manajemen dan pegawai di organisasi tentang seriusnya dan peringatan dini tindakan kecurangan. Sebuah perbaikan pada peran dan tanggung jawab auditor internal akan membantu deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan dalam organisasi.

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa kebijakan *whistle blowing* (M=3.61) dan saluran telepon khusus tindakan kecurangan (M=3.59) adalah cara yang paling sedikit digunakan oleh akuntan sektor publik dan auditor internal di Malaysia. Hal ini mungkin karena Malaysia memiliki sedikit aturan untuk melindungi pelapor pelanggaran atau tindakan kecurangan. Perlindungan hukum tertentu untuk para pelapor yang mengarah pada ketentuan anti-tuntutan dan meningkatkan "niat baik" adalah penting bagi Malaysia (Ahmad dan Mohd Shariff, 2009). Penggunaan saluran telepon khusus juga sangat terbatas pada sektor publik di Malaysia, hanya sedikit departemen yang menyediakan fasilitas tersebut untuk para pegawai sehingga dapat melaporkan praktek tidak etis yang terjadi di antara rekan kerja maupun atasannya. Saluran ini akan menyediakan cara yang aman dan tertutup dalam memberi informasi atau masukan karena

sifatnya pribadi dan tanpa nama. Pemerintah harus mempertimbangkan menyediakan saluran telepon khusus terkait tindakan kecurangan tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk pegawai untuk melaporkan tindakan kecurangan.

Ironisnya, penggerakan akuntan forensik juga merupakan teknik yang paling sedikit digunakan di sektor publik. Hal ini mungkin karena ketiadaan departemen khusus pada sektor publik di Malaysia yang menyediakan keahlian di bidang akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah mekanisme deteksi tindakan kecurangan, dimana akuntan forensik memiliki berbagai kombinasi keahlian, termasuk, akuntansi, audit, hukum dan teknik investigatif yang memungkinkan mereka untuk menjalankan investigasi akuntansi forensik. Keahlian ini dapat menyediakan alat untuk mengurangi praktek tindakan kecurangan dan perbuatan yang salah di sektor publik. Menurut Kasum (2009), layanan akuntan forensik sangat diperlukan di sektor publik dibandingkan di sektor swasta. Sangatlah penting untuk memiliki fungsi akuntan forensik di sektor publik untuk membantu pemerintah dalam mendeteksi, mencegah dan menginvestigasi kasus tindakan kecurangan (Omar, Mohamed, Jomatin, dan Haron, 2013).

4.3. Teknologi Tindakan Kecurangan

Hasil dari teknologi yang digunakan di sektor publik untuk mendeteksi tindakan kecurangan sebagaimana ditunjukkan di Tabel 4. Menggunakan sembilan pernyataan, nilai rata-rata berkisar antara 3.51 hingga 3.98 menandakan kurang setuju. Diketahui bahwa perlindungan password (M=3.98), sistem keamanan jaringan (M=3.94), antivirus (M=3.86), pengambilan sampel (M=3.82) dan audit berkelanjutan (M=3.82) adalah hal yang paling sering digunakan atas teknologi di sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor publik di Malaysia sadar akan pentingnya penggunaan teknologi dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan.

Walaupun demikian, analisis digital (M=3.51) merupakan mekanisme paling sedikit yang digunakan pada sektor publik. Hal ini mungkin karena dibutuhkan investasi lebih besar untuk menyediakan teknologi sejenis anti-fraud dan kurang efektif. Hasil ini tidak sejalan dengan Bierstaker, dkk. (2006) yang menemukan bahwa antivirus, sistem keamanan jaringan dan perlindungan *password* merupakan metode yang paling efektif. Studi mereka dilaksanakan di sektor swasta, dimana kebanyakan organisasi sektor swasta melakukan investasi di teknologi untuk mencegah tindakan kecurangan di organisasi mereka. Dibandingkan dengan sektor publik, terutama Malaysia, kurangnya alokasi dana dan keahlian yang dimiliki akan menjadi penghambat dalam mengimplementasikan perangkat lunak anti kecurangan.

	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	Rata-rata	Standar Deviasi
QFT1	Menemukan sampel	2 (3.9)	3 (5.9)	7 (13.7)	29 (56.9)	10 (19.6)	3.82	.953
QFT2	Penggalian data	2 (3.9)	3 (5.9)	7 (13.7)	35 (68.6)	4 (7.8)	3.71	.855
QFT3	Analisis Digital	2 (3.9)	4 (7.8)	16 (31.4)	24 (47.1)	5 (9.8)	3.51	.925

QFT4	Audit berkelanjutan	1 (2.0)	4 (7.8)	9 (17.6)	26 (51.0)	11 (21.6)	3.82	.932
QFT5	Rasio keuangan		8 (15.7)	8 (15.7)	29 (56.9)	6 (11.8)	3.65	.890
QFT6	Anti- Virus		3 (5.9)	13 (25.5)	23 (45.1)	12 (23.5)	3.86	.849
QFT7	Perlindungan Password		3 (5.9)	7 (13.7)	29 (56.9)	12 (23.5)	3.98	.787
QFT8	Perlindungan jaringan internet	1 (2.0)	2 (3.9)	7 (13.7)	30 (58.8)	11 (21.6)	3.94	.835
QFT9	Menyaring perangkat lunak	1 (2.0)	4 (7.8)	8 (15.7)	29 (56.9)	9 (17.6)	3.80	.895

5. Kesimpulan

Tujuan utama dari studi ini adalah: (i) untuk mengidentifikasi kesadaran pegawai di sektor publik akan tindakan kecurangan, (ii) untuk menelaah keberadaan teknik deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan; dan (iii) untuk menelaah penggunaan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan berdasarkan persepsi akuntan dan auditor internal. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 93% responden sadar akan perlunya pelaporan dan tanggung jawab untuk mendeteksi tindakan kecurangan. Selama tiga tahun, 73% setuju terdapat perbaikan dalam metode deteksi tindakan kecurangan yang diimplementasikan dalam organisasi mereka. Meskipun terdapat kesadaran, terlihat bahwa kurang terdapat pelatihan dan ini harus terus dikembangkan untuk pegawai sektor publik, karena hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan.

Sementara dalam mekanisme deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan, audit operasional, peningkatan peran komite audit, revidi dan perbaikan pengendalian internal, revidi kas, kebijakan pelaporan tindakan kecurangan, dan kebijakan rotasi pegawai adalah beberapa mekanisme yang dirasakan efektif oleh auditor internal dan akuntan di sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor internal dan akuntan sektor publik memiliki peran penting dalam deteksi dan pencegahan tindakan kecurangan. Terkait teknologi tindakan kecurangan, perlindungan password, perlindungan jaringan internet, anti-virus, menemukan sampel dan audit berkelanjutan adalah perangkat atau teknologi yang sering digunakan untuk mencegah tindakan kecurangan di sektor publik.

Diantara semua temuan tersebut, juga dapat dilihat bahwa kebijakan whistleblowing, saluran telepon khusus terkait tindakan kecurangan, dan akuntan forensik lebih jarang digunakan. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk menyediakan lebih banyak saluran telepon khusus terkait tindakan kecurangan, memperbaiki kebijakan *whistleblowing* dan membangun departemen akuntansi forensik di sektor publik untuk meningkatkan mekanisme pencegahan tindakan kecurangan di sektor publik.

Terima kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Menteri Pendidikan, Institut Penelitian Akuntansi, dan Fakultas Akuntansi, Universitas Teknologi MARA, Malaysia dalam bantuan pendanaan dan fasilitas untuk studi ini. Artikel ini tidak akan terwujud tanpa dukungan tersebut.

Referensi

- Ahmad, R., Mohd Shariff, R.N., 2009. Whistleblowing protection and freedom of speech: Finding respect at workplace. International Conference on Corporate Law (ICCL) 2009, 1st – 3rd June, Surabaya, Indonesia.
- Albrecht, W.S., Albrecht, C.C., Albrecht, C.O., Zimbelman, M.F., 2012. Fraud Examination (4th Ed.). Mason: Thomson South-Western Publishing.
- Alleyne, P., & Howard, M., 2005. An exploratory study of auditors' responsibility for fraud detection in Barbados. *Managerial Auditing Journal*, 20(3), 284–303. doi:10.1108/02686900510585618
- Apostolou, N. Crumbley, D.L., 2008. Auditors' responsibilities with respect to fraud: a possible shift? *CPA Journal*. Retrieved on 17 December 2014 from <http://www.nysscpa.org/cpajournal/2008/208/essentials/p32.htm>
- Bierstaker, J.L., Brody, R.D., Pacini, C., 2006. Accountants' perceptions regarding fraud detection and prevention methods. *Managerial Auditing Journal*, 21(5), 520-535.
- Bolton, R.J., Hand, D.J., 2002. Statistical Fraud Detection: A Review. *Statistical Science*, 17(3), 235–255. doi:10.1214/ss/1042727940
- Cates, W.M., 1985. *A Practical Guide to Educational Research*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Durtschi, C., Hillison, W. & Pacini, C., 2004. The effective use of Benford's Law to assist in detecting fraud in accounting data. *Journal of Forensic Accounting*, 17-34.
- Ernst & Young, 2014. Overcoming compliance fatigue Reinforcing the commitment to ethical growth: 13th Global Fraud Survey. Retrieved from [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-13th-Global-Fraud-Survey/\\$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-13th-Global-Fraud-Survey/$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf)
- Eiya, O., Otor, J.I., 2013. Forensic accounting as a tool for fighting financial crime in Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 2013, 4(6), 1-8.
- Gullkvist, B., Jokipii, A., 2013. Perceived importance of red flags across fraud types. *Critical Perspective on Accounting* 24, 44-61.
- Haron, R., Mohamed, N., Jomitin, B., Omar, N., 2014. Forensic accounting and its prospect in Malaysian public sector. 4th International Conference on Management. Retrieved on 20 December 2014 from http://www.internationalconference.com.my/proceeding/icm2014_proceeding/4thICM2014/020_116_4thICM2014_Proceeding_p229.pdf
- <http://www.transparency.org.my/media-and-publications/auditor-general-report-2013>
- Jans, M., Lybaert, N., Vanhoof, K., 2010. Internal fraud risk reduction: results of a data mining case study. *International Journal of Accounting Information Systems* 11, 17-41.

- Kasum, A.S., 2009. The Relevance of Forensic Accounting to Financial Crimes in Private and Public Sectors of Third World Economies: A Study from Nigeria. Proceedings of The 1st International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, June 11-13, 2009.
- KPMG Fraud, Bribery and Corruption Survey, 2012. – Retrieved from: <http://www.kpmg.com/au/en/issuesandinsights/articlespublications/fraud-survey/pages/fraud-bribery-corruption-survey-2012.aspx>
- KPMG Malaysia, 2013. KPMG Malaysia Fraud, Bribery and Corruption Survey.
- Moyes, G.D., Baker, C.R., 2003. Auditors' beliefs about fraud detection effectiveness of standard audit procedures. *Journal of Forensic Accounting* (4): 199-216.
- Oluwagbemiga, O.A., 2010. The role of auditors in fraud detection, prevention and reporting in Nigeria. *Library Philosophy and Practice* (e-journal). Retrieved on 20 December 2014 from <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/517>
- Omar, N., Bakar, K.M.A., 2012. Fraud prevention mechanisms of Malaysian government-link companies: an assessment of existence and effectiveness. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, ISSN 1548-6583, January 2012, 8(1), 15-31.
- Omar, N., Jomitin, B., Haron, R., 2013. The relevance of forensic accounting in public sector: A study of selected government agencies in Klang valley. The 5th International Conference on Financial Criminology(ICFC) 2013.
- Perry, L.M, Bryan, B.J., 1997. Heightened responsibilities of the internal auditor in the detection of fraud. *Managerial Finance*, 23(12), 38 -43. Pincus, K.V., 1989. The efficacy of a red flags questionnaire for assessing the possibility of fraud. *Accounting, Organizations and Society*, 14(1/2), 153-163.
- PwC, 2012. Fighting Fraud in the Public Sector II.
- PwC, 2014. Fighting Fraud in the Public Sector III. Retrieved from: <http://www.pwc.com.au/consulting/assets/risk-controls/Fighting-Fraud-Feb15.pdf>
- Rahman, R.A., Anwar I.S.K., 2014. Effectiveness of fraud prevention and detection techniques in Malaysia Islamic Banks. *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 145, 97-102.
- Seetharaman, A., Senthilvelmurugan, M., Periyayagam, R., 2004. Anatomy of computer accounting frauds. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 19 Iss: 8, pp.1055 - 1072.
- Smith, G.S., 2012. Can an auditor ever be a first responder to financial frauds? *Journal of Financial Crime*, 19(3), 291 – 304.